KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI SELATAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 20
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
TELP. (0411)
FAX.
SMS Center.
FLX.
EMAIL : humasbptdsulsel@gmail.com
HOME PAGE.

Nomor : AJ.504/1/1/BPTDII-SULSEL/2026 Makassar, 27 Januari 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Bantuan Penguraian Aksi Unjuk Rasa yang Menghambat Operasional Angkutan Barang

Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo

Menindaklanjuti Surat dari Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27 Januari 2026, Perihal: Permohonan Solusi Transportasi Logistik ke/dari Wilayah Luwu Utara, Palopo dan Luwu. (Terlampir)

Dalam rangka menjamin kelancaran, keselamatan, dan keberlangsungan operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya angkutan barang yang membawa logistik dan bahan bakar minyak (BBM), bersama ini kami sampaikan bahwa telah terjadi aksi unjuk rasa masyarakat yang melakukan penutupan dan/atau penghalangan akses jalan umum sejak tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan saat ini.

Aksi tersebut telah menghambat operasional kendaraan angkutan barang, termasuk angkutan logistik dan BBM, sehingga menyebabkan terhentinya aktivitas pengangkutan, meningkatnya biaya operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi dan pelaku usaha angkutan, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada kenaikan biaya perjalanan dan distribusi barang di wilayah terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan dukungan Saudara untuk dapat berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah masing-masing, termasuk aparat keamanan dan instansi terkait lainnya, guna membantu mengurai dan menangani aksi unjuk rasa dimaksud, sehingga akses jalan dapat kembali digunakan secara normal dan operasional angkutan barang dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan,

Andy Sanjaya, S.Si.T., M.M.
NIP. 197611062000121001

Tembusan Yth :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Lalu Lintas Jalan, Ditjen Hubdat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel;
5. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)
6. Ikatan Logistik dan Forwarder Indonesia (ILFA)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nomor : AJ.504/1/1/BPTDII-SULSEL/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

DOKUMENTASI



Demo massa mengecor Jalan Trans Sulawesi di Perbatasan Luwu-Wajo
(Sumber : Detik.com Jumat, 23 Januari 2026)



Demonstrasi massa Luwu Raya Kembali menutup Jalan Trans Sulawesi dengan menebang pohon di Walenrang Utara (Sumber : detik.com Sabtu, 24 Januari 2026)

`

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Sejumlah kendaraan terjebak macet parah di Trans Sulawesi akibat jalan diblokade massa penuntut pemekaran Luwu Raya di Desa Marabuana
(Sumber : beritasatu.com Minggu, 25 Januari 2026)



Demo DOB Luwu Tengah memanas, 15 Pohon ditebang warga untuk lockdown Jalan Nasional
(Sumber : Harian.fajar.co.id Senin, 26 Januari 2026)

`

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DEWAN PENGURUS WILAYAH PROV. SULAWESI SELATAN DAN BARAT
ALFI / ILFA
ALFI – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia
Indonesian Logistics and Forwarders Association – ILFA
Alamat : Jalan Nusantara Nomor.182 Lt. III Makassar 90143
Telepon : 0411- 3632641 dan e-Mail : dpwalfisulsel@gmail.com

Nomor : 12/DPW-ALFI/SSB/I/2026 Makassar, 27 Januari 2026
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Solusi Transportasi Logistik ke/dari Wilayah Luwu Utara, Palopo dan Luwu

Kepada Yth,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)
Kelas II Sulawesi Selatan

di- Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu bersama ini kami menyampaikan permohonan solusi terkait kendala serius akses transportasi darat bagi ekspedisi logistik menuju wilayah pemekaran tersebut.

Saat ini, kegiatan distribusi logistik menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan rute angkutan, keterbatasan akses jalan, serta belum adanya solusi teknis operasional pada masa transisi pemekaran wilayah. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan pengiriman logistik dan berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta kelancaran aktivitas Logistik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon perhatian dan tindak lanjut dari BPTD dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan solusi konkret, berupa:

1. Kejelasan dan rekomendasi rute transportasi darat bagi kendaraan ekspedisi logistik.
2. Kebijakan atau langkah teknis sementara guna menjamin kelancaran angkutan barang ke/dari wilayah Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.
3. Koordinasi aktif antara BPTD, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya agar distribusi logistik dapat berjalan aman, lancar, dan berkesinambungan

Mengingat tingginya urgensi kebutuhan logistik di wilayah tersebut, kami berharap surat permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PENGURUS WILAYAH
ALFI/ILFA
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN BARAT

KETUA UMUM,	SEKRETARIS UMUM,
H. YODI MALENDRA, AMd, SE	**H. MUH. HATTA, S.SOS**

Tembusan :

1. Ketua DPP ALFI/ILFA diJakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).